

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Povinsi DIY dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2011-2013**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan kemudian dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Bahwasanya implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral lebih khususnya Bidang Bina Marga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan kebijakan sampai pada proses implementasi dan dampaknya kepada masyarakat baik langsung ataupun secara tidak langsung. Alur dalam proses pembuatan kebijakan juga sudah berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan Rencana Strategis oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk kemudian nantinya dimasukkan kedalam Rencana Kerja Anggaran sehingga bisa segera dilakukan implementasi kebijakannya.

Kegiatan pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan Jembatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Beberapa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan baru juga telah selesai dengan tepat waktu. Untuk estimasi dana yang di alokasikan juga sudah cukup. Dengan demikian dapat

dikatakan implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral khususnya Bidang Bina Marga dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan sudah baik.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Bidang Bina Marga dalam pembangunan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi sudah berjalan dengan baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dengan langsung datang ke kecamatan bahkan desa hanya untuk mensosialisasikan kebijakan yang akan dijalankan agar nantinya masyarakat sudah mengetahui dampak yang akan ditimbulkan.
2. Sumber Daya sudah mencukupi dalam hal sumber daya financial untuk menunjang kegiatan dilapangan, kemudian juga sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

3. Disposisi pelaksana kebijakan juga sudah baik, terlihat dengan komitmen yang tinggi dari aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral untuk terus maju dan berkembang lebih baik. Akan tetapi hal itu terkendala dengan tingkat pendidikan pegawai yang kebanyakan hanya berada pada jenjang SLTA, hal ini nantinya dikhawatirkan akan mengganggu kinerja. Kemudian respon dari pelaksana dalam melihat kondisi sekitar sehingga nantinya dalam menyusun kebijakan berangkat dari kondisi masyarakat yang ada.
4. Struktur Birokrasinya sudah baik, terlihat dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian yang sudah jelas. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas nantinya. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada yang ada, dimana semua tugas pokok dan fungsi sudah tercantum di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Bidang Bina Marga dalam hal pembangunan jalan dan jembatan. Ada faktor disposisi yang menghambat dikarenakan kemampuan dan pengetahuan dari para pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar hanya mencapai taraf SLTA sesuai dengan data yang diperoleh dari Lakip Dinas PU ESDM Tahun 2013. Hal ini dikhawatirkan nantinya akan menghambat kinerja yang

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa saran untuk semua pelaksana kebijakan khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Bagian Bina Marga sebagai pemegang penuh kebijakan. Adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Masih perlunya penambahan staff dan tenaga ahli di Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral khususnya Bidang Bina Marga untuk lebih memudahkan kerja nantinya.
2. Kegiatan sosialisasi tentang kebijakan yang dibuat haruslah lebih sering dan lebih kreatif lagi sehingga menarik minat masyarakat untuk mengetahui kebijakan apa saja yang akan dibuat sehingga masyarakat bisa mengetahui dampak kebijakan bagi mereka